



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke	: III (Tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: Badan Ekonomi Kreatif RI.
Hari/Tanggal	: Selasa, 7 Febuari 2017.
Pukul	: 14.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Tuti Retnowati, AMd./Kasubag Rapat Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan dan Daya Serap APBN Perubahan TA 2016; 2. Permasalahan dan Solusi APBN Perubahan TA 2016; 3. Realisasi Target Kinerja Dibandingkan dengan RKP Tahun 2016; 4. Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN TA 2017; dan 5. Permasalahan dan Antisipasi APBN TA 2017.
Hadir	: 46 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Triawan Munaf/Kepala Bekraf beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.30 WIB oleh Ferdiansyah S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Bekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Bekraf RI menyampaikan beberapa hal antara lain:

1. Realisasi daya serap APBN Perubahan TA 2016 per 31 Desember 2016 sebesar 34% (Rp350,100 miliar dari total pagu Rp1,024 triliun) sebelum *self blocking*, sedangkan daya serap setelah *self blocking* adalah sebesar 53% (Rp350,100 miliar dari total pagu Rp660,474 miliar).

2. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan APBN Perubahan TA 2016 antara lain:
 - a. Rentang waktu pelaksanaan yang sempit (baru efektif berjalan sejak Agustus 2016) karena:
 - i. Pindah ke gedung BUMN pada bulan Juli 2016.
 - ii. Sestama baru dilantik pada tanggal 29 Agustus 2016.
 - b. Layanan pengadaan belum terbentuk, sehingga masih dititipkan di LKPP dan KemenInfo, akibatnya memerlukan waktu yang lama.
 - c. Kepastian administrasi pengelolaan keuangan kurang memadai:
 - i. Dalam struktur organisasi yang ada masing-masing deputi hanya dibekali satu Eslon IV sebagai Kasubag Tata Usaha yang bertugas sebagai administrasi kantor dan administrasi keuangan.
 - ii. Jajaran verifikasi keuangan terbatas, hanya 3 (tiga) orang melayani enam deputi.
 - d. Kegiatan pendukung kepada pelaku ekonomi kreatif belum dapat memenuhi kebutuhan karena sempitnya waktu pelaksanaan.

3. Capaian kinerja Bekraf tahun 2016

No	Sasaran	Target	Realisasi
1	Pertumbuhan PDB Ekraf (sekurang-kurangnya)	8,5%	5,21% (*)
2	Jumlah Tenaga Kerja Ekraf (sekurang-kurangnya)	12,3 juta Orang	16,20 juta Orang
3	Kontribusi Ekspor/Devisa Bruto Ekraf (sekurang-kurangnya)	7,07%	(**)

(*) Sampai dengan triwulan ke III

(**) Nilai ekspor US\$19,99 miliar

4. Langkah-langkah persiapan pelaksanaan APBN 2017:
 - a. Penyusunan kegiatan lebih awal: penyusunan rencana umum pengadaan dan penetapan jajaran pengelola keuangan lebih awal.
 - b. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bekraf dalam proses penetapan, ditargetkan beroperasi bulan Februari 2017.
 - c. Penambahan unit kerja Eselon IV di masing-masing direktur, hal ini sudah diajukan ke Kementerian PAN-RB, ditargetkan berfungsi bulan Februari 2017.
 - d. Kegiatan pendukung disusun lebih terencana dan telah ditetapkan proses seleksi proposal oleh Tim Kurasi (Peraturan Kepala Bekraf No. 19 Tahun 2016).
 - e. Meningkatkan kualitas SDM yang terkait dengan realisasi anggaran (bendahara, pengadaan, dll) termasuk membentuk Satuan Tugas dari tenaga profesional sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No. 72 Tahun 2015.
 - f. Memperbaiki bisnis proses (SOP dan standar-standar biaya).
 - g. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana kerja.

5. Permasalahan dan Antisipasi pelaksanaan APBN 2017:
 - a. Potensi Permasalahan:
 - i. Tenaga pelaksana di Bekraf masih didominasi tenaga kontrak yang dapat berakibat kinerjanya belum dapat optimal.
 - ii. PNS yang ada di Bekraf masih berstatus dipekerjakan sehingga masih ada kemungkinan ditarik ke instansi asal.
 - iii. Pemotongan anggaran secara nasional secara signifikan menghambat pelaksanaan kegiatan.
 - b. Antisipasi:
 - i. Bekraf saat ini sedang mengajukan formasi CPNS ke Kementerian PAN-RB.
 - ii. PNS yang ada di Bekraf sedang dalam proses pengusulan sebagai pegawai tetap di Bekraf.
 - iii. Pekerjaan-pekerjaan yang dikontrakkan pihak ketiga akan dikelola secara ketat dan segera dilaporkan ke KPPN sehingga ada jaminan kegiatan tersebut dapat diselesaikan.
- B. Komisi X DPR RI memberikan sejumlah catatan dan tanggapan antara lain:
1. Terhadap daya serap, Komisi X DPR RI menyayangkan daya serap APBN TA 2016 Bekraf hanya sebesar 34% (sebelum *self blocking*) atau 53% (setelah *self blocking*). Daya serap tersebut jauh dari yang ditargetkan sebesar 88,5% sebagaimana disampaikan pada RDP tgl.19 Oktober 2016.
 2. Terhadap langkah-langkah persiapan pelaksanaan APBN 2017, Komisi X DPR RI memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah persiapan yang telah dilakukan, dan meminta Bekraf untuk berkoordinasi dengan K/L terkait agar langkah-langkah yang telah disusun tersebut dapat terlaksana secara maksimal.
 3. Terhadap permasalahan dan antisipasi pelaksanaan APBN 2017, Komisi X DPR RI memberikan apresiasi kepada Bekraf yang telah memetakan permasalahan dan langkah-langkah antisipasinya, dan meminta Bekraf untuk berkoordinasi dengan K/L terkait agar langkah-langkah yang telah disusun tersebut dapat terlaksana secara maksimal.
 4. Terhadap program/kegiatan Bekraf, Komisi X DPR RI mendorong Bekraf untuk melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenpar, dan Kemendagri.
 5. Terhadap permasalahan pegawai, Komisi X DPR RI mendorong Bekraf untuk mengajukan dan/atau koordinasi dengan K/L yang memungkinkan penugasan pegawai ke Bekraf.
 6. Dalam rangka pengawasan kebijakan dan kinerja Bekraf, Komisi X DPR RI mendesak Bekraf untuk menyampaikan Renstra Bekraf periode 2015-2019.
 7. Komisi X DPR RI mendesak Bekraf untuk:
 - a. Menyampaikan hasil survei khusus pelaku usaha ekonomi kreatif yang dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Bekraf.
 - b. Memperjelas kriteria dan standar kerja sama untuk mewujudkan konsep lima pilar penyangga (*pentahelix*).

- c. Melaporkan metode perhitungan dan capaian PDB-Tenaga Kerja-dan Kontribusi Ekspor tahun 2016 per akhir Desember 2016.
 - d. Menyampaikan perkiraan target capaian PDB-Tenaga Kerja-dan Kontribusi Ekspor, dan target daya serap APBN 2017.
- C. Menyampaikan jawaban secara tertulis atas tanggapan/masukan/pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI, dan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada poin II.B.6 dan II.B.7 paling lambat pada tanggal 2 Maret 2017.
- D. Komisi X DPR RI dan Kepala Bekraf akan melakukan Raker dan RDP bersama dengan Mendikbud, Menristekdikti, dan Menpar dalam waktu dekat dengan agenda koordinasi dan sinergitas program ekonomi kreatif.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.10 WIB

KEPALA BEKRAF RI



TRIAWAN MUNAF

KETUA RAPAT,



FERDIANSYAH, S.E., M.M 8